

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan usaha pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah diahlikan ke provinsi baik dalam proses pengurusan perizinan maupun pengawasan yang awalnya kabupaten kota memiliki wewenang dalam pengelolaan usaha pertambangan. Begitu pula pengawasan usaha pertambangan di ahlikan ke provinsi dan pusat.
2. Implikasi dari berlakunya undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap pengelolaan usaha pertambangan secara normave dengan yuridis. Secara normative implikasinya timpang tindih aturan antra undang-undang no. 4 tahun 2009 dengan undang-undang no 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan aturan tentang pengelolan di tingkat kabupaten kota bahkan di cabut . Secara yuridis implikasinya berdampak pada Struktur organisasi/kelembagaan, personil, pendanaan sarana dan prasarana, akan banyak penambang tanpa izin, merusakn lingkungan tidak terawasi, penerimaan bukan pajak pada sektor pertambanagan akan berkurang dan akan berdampak pada pembangunan darah

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan personil di tingkat provinsi Gorontalo terhadap pengelolaan usaha pertambangan dan kabupaten/kota juga harus terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan
2. Perlu adanya revisi kembali tentang undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang minerba agar dapat disesuaikan dengan undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan perlu adanya peraturan pemerintah dan peraturan menteri berkaitan dengan urusan bidang energi sumber daya mineral di kabupaten/kota

DAFTAR PUSTAKA

- Fenty U. Puluhulawa. 2013. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam Prespektif Hukum*). Yogyakarta : Interpena
- H. Salim HS. 2010 . *Hukum Pertambangan Di Indonesia* . Jakarta : Rajawali Press
- H. Salim HS. 2007 . *Hukum Pertambangan Di Indonesia* . Jakarta : Grafindo persada
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Yusni Hasyimzoem, M. Iwan Satriwan, Ade Arif Firmansyah dan Siti Khoiriah. 2017. *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung : PT raja Grafindo Persada.
- Philipus M Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Philipus M. Hadjon. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta : Universitas Trisakti,
- La Ode Bariun. 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. (Disertasi.) Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar

- Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Jakarta
- Lukman Santisi Az. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- C.S.T Kansil dan Chiristen S.T Kansil . 2001. *Pemerintahan Daerah Di indonesia*. jakarata : sinar grafika
- Fariied ali dan Andi syamsu alam . 2012. *Studi kegiatan pemerinta*. Bandung : Pt refika aditama
- Ni'matul Huda. 2009 *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII,
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Abdul Rahim DKK. 2015. *Peran Pemerintah dalam Penertiban Pertambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara* (Jurnal VolV NO.2) Universitas Muhammadiyah, Makassar
- Agus Candra DKK. 2014. *Strategi Pengelolaan Lingkungan Akibat Dampak Pertambangan Breksi Batu Apung di Desa Segoroyoso, kecamatan Pleret, Kabupaten Blitung* (Jurnal Vol VI NO.2) UNS
- Danang Yulleo Eko Bramanto, *kajian yuridis tentang kegiatan pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah* (skripsi) , (fakultas hukum univesitas muhamadiyah jember

Karim R.toiti, *implementasi pasal 16 peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 1 tahun 2008 mengenai izin usaha perikanan di provinsi gorontalo* (skripsi), (fakultas hukum uneversitas Gorontalo tahun 2014)

Yelli Melvi Dapu, *Implikasi Undang-undang no 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahn DI Bidang Kelautan Dan Perikana*, (Jurnal Vol IV. No 8 Agustus 2016

H. Salim HS. 2012 . *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* . Jakarta : Sinar Grafika

Suriansyah Murhaini, *manajemen pengawasan pemerintah daerah*, (Yogyakarta : puistaka belajar, 2014)

Nirahua Salmon E.m, *Hukum Perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam Di wilyah Laut Daerah*, (Jakarta : Pt Raja Grapindo Prsada, 2013)

Muslan Abdruhman, sosiologi dan metode penelitian hukum, (malang :umm pres, cetakan pertama mei 2009)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 18

Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1980 tentang pemggolongan Bahan-bahan Galian

Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

<http://fitriahartina011.blogspot.co.id/2015/11/implikasi-hasil-hasil-penelitian-dan.html>